

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol belum sesuai dengan potensi yang ada di Kota Kupang. Karena data yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang merupakan data perkiraan dari permintaan penjualan label minuman beralkohol yang ada.
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang adalah kurangnya tenaga retribusi pada Badan Keuangan Daerah, keterbatasan data laporan tentang potensi penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, faktor like dan dislike dari pengambil kebijakan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Kupang adalah sebagai berikut :

1. Perlunya tenaga teknis untuk melakukan monitoring dan perhitungan terhadap persediaan minuman beralkohol yang ada di Kota Kupang secara keseluruhan dan perlu adanya transparansi data dari penjual mengenai minuman beralkohol yang sebenarnya pada tenaga teknis agar dapat memudahkan melakukan perhitungan potensi dengan pasti.

2. Dalam penetapan anggaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menambahkan perhitungan potensi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang sebenarnya di Kota Kupang. Hal ini dilakukan agar realisasi penerimaan yang dicapai sesuai dengan penetapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Teknis No. 4 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja.
- Fay, Yeston .A. Nepa. 2009. *Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2009*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira: Kupang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba empat.
- Lima, Petrus 2013. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang serta Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya 2007-2011*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira: Kupang.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke – 4, Liberty, Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Fungsi dan Struktur APBD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Jenis – Jenis Pendapatan Asli Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prameka, .S. Adelia. 2011. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)* Universitas Brawijaya Malang. <http://www.eprints.undip.ac.id/..PRAMEKA>.

- PSAP No. 2 Paragraf 50 Tentang Definisi Pembiayaan.
- PSAP No. 2 Paragraf 51 dan 54 Tentang Sumber Penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah.
- PSAP No. 2 Paragraf 55 dan 57 Tentang Sumber Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/ Daerah.
- PSAP No. 2 Paragraf 58 dan 61 Tentang Definisi Pembiayaan Neto.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Soedargo, R.2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UN Eresco, Bandung.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Definisi APBD.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. www.prokum.wsdm.go.id/uu/2004/UU-32-2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.Hukumonline.com/pusatdata/lt4bo638ef883.
- Warsito, 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada.
- Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.